

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 065.01.1.664880/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 06
Tanggal : 27 April 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (065) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
- 2. Unit Organisasi : (01) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
- 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- 4. Kode>Nama Satker : (664880) KANTOR DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
- Sebesar : Rp. 24.932.100.000 (DUA PULUH EMPAT MILIAR SEMBILAN RATUS TIGA PULUH DUA JUTA SERATUS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
04 EKONOMI
04.90 EKONOMI LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	24.932.100.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN JAKARTA III (088) Rp. 24.932.100.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

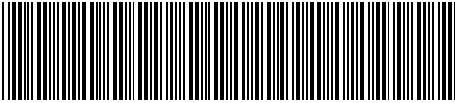
ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 065.01.1.664880/2025

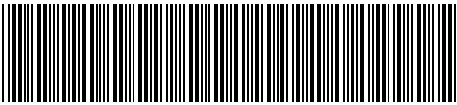


DS:0460-0800-6586-2280

Satker : (664880) KANTOR DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

ED	Program Penanaman Modal dan Hilirisasi	Rp.	24.932.100.000
ED.3226	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I	Rp.	4.531.456.000
ED.3227	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II	Rp.	4.764.713.000
ED.3228	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III	Rp.	4.418.929.000
ED.3229	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	Rp.	6.856.259.000
ED.6781	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah V	Rp.	4.360.743.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.664880/2025
I A. INFORMASI KINERJA



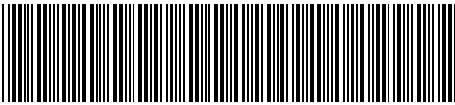
DS:0460-0800-6586-2280

Kementerian Negara/Lembaga : (065) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : (01) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (664880) KANTOR DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Halaman : I A. 1

Program	:	065.01.ED	Program Penanaman Modal dan Hilirisasi				24.932.100.000		
Kegiatan	:	3226	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I				4.531.456.000		
Indikator Kinerja Kegiatan	:								
Klasifikasi Rincian Output	1	:	3226.BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		14,00	Badan usaha, Miliar USD	835.870.000	
Rincian Output	:	01	BDH.021	Pengawasan Berbasis Resiko di Wilayah I		14.00	Badan usaha	835.870.000	
Klasifikasi Rincian Output	2	:	3226.BMA	Data dan Informasi Publik		1,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	782.578.000	
Rincian Output	:	01	BMA.021	Asistensi dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal di Wilayah I		1.00	layanan	782.578.000	
Klasifikasi Rincian Output	3	:	3226.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		18,00	Badan usaha, Miliar USD	2.913.008.000	
Rincian Output	:	01	QDH.021	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah I	(PN)	16.00	Badan usaha	753.008.000	
			02	QDH.024	Fasilitasi dan Evaluasi Percepatan Realisasi Investasi Proyek PSN	(PN)	2.00	Badan usaha	2.160.000.000
Kegiatan	:	3227	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II				4.764.713.000		
	:								
Klasifikasi Rincian Output	4	:	3227.BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		15,00	Badan usaha, Miliar USD	1.599.990.000	
Rincian Output	:	01	BDH.021	Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah II		15.00	Badan usaha	1.599.990.000	
Klasifikasi Rincian Output	5	:	3227.BMA	Data dan Informasi Publik		1,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	1.210.072.000	
Rincian Output	:	01	BMA.021	Asistensi dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal di Wilayah II		1.00	layanan	1.210.072.000	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.664880/2025
I A. INFORMASI KINERJA

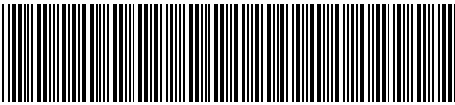


DS:0460-0800-6586-2280

Kementerian Negara/Lembaga : (065) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : (01) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (664880) KANTOR DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Klasifikasi Rincian Output	6	:	3227.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	26,00	Badan usaha, Miliar USD	1.954.651.000
Rincian Output		:	01 QDH.021	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah II (PN)	26.00	Badan usaha	1.954.651.000
Kegiatan		:	3228	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III			4.418.929.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:					
Klasifikasi Rincian Output	7	:	3228.BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	30,00	Badan usaha, Miliar USD	1.879.980.000
Rincian Output		:	01 BDH.021	Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah III	30.00	Badan usaha	1.879.980.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	3228.BMA	Data dan Informasi Publik	1,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	1.095.955.000
Rincian Output		:	01 BMA.021	Asistensi dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal di Wilayah III	1.00	layanan	1.095.955.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	3228.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	21,00	Badan usaha, Miliar USD	1.442.994.000
Rincian Output		:	01 QDH.021	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah III (PN)	21.00	Badan usaha	1.442.994.000
Kegiatan		:	3229	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV			6.856.259.000
		:					
Klasifikasi Rincian Output	10	:	3229.BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	35,00	Badan usaha, Miliar USD	2.264.990.000
Rincian Output		:	01 BDH.021	Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah IV	35.00	Badan usaha	2.264.990.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	3229.BMA	Data dan Informasi Publik	1,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	2.624.052.000
Rincian Output		:	01 BMA.021	Asistensi dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal di Wilayah IV	1.00	layanan	2.624.052.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.664880/2025
I A. INFORMASI KINERJA

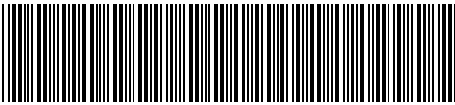


DS:0460-0800-6586-2280

Kementerian Negara/Lembaga : (065) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : (01) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (664880) KANTOR DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Data dan Informasi Publik						layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	
Klasifikasi Rincian Output	12	:	3229.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	21,00	Badan usaha, Miliar USD	1.967.217.000
Rincian Output		:	01 QDH.021	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah IV (PN)	21.00	Badan usaha	1.967.217.000
Kegiatan		:	6781	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah V			4.360.743.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:					
Klasifikasi Rincian Output	13	:	6781.BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	30,00	Badan usaha, Miliar USD	917.940.000
Rincian Output		:	01 BDH.021	Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah V	30.00	Badan usaha	917.940.000
Klasifikasi Rincian Output	14	:	6781.BMA	Data dan Informasi Publik	1,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	282.739.000
Rincian Output		:	01 BMA.021	Asistensi dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal di Wilayah V	1.00	layanan	282.739.000
Klasifikasi Rincian Output	15	:	6781.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Rekomendasi	206.850.000
Rincian Output		:	01 FAE.022	Fasilitasi, Evaluasi dan Pembinaan terhadap Pelaksanaan DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal dan Dana Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.00	Laporan	206.850.000
Klasifikasi Rincian Output	16	:	6781.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	3,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	2.700.086.000
Rincian Output		:	01 QAH.021	Satgas Percepatan Investasi (PN)	3.00	layanan	2.700.086.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.664880/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:0460-0800-6586-2280

Kementerian Negara/Lembaga : (065) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : (01) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (664880) KANTOR DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Klasifikasi Rincian Output	17	:	6781.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	6,00	Badan usaha, Miliar USD	253.128.000
Rincian Output		:	01	QDH.021 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah V (PN)	6,00	Badan usaha	253.128.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

ttd.
Rosan Perkasa Roeslani
NIP. 3174053112680002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.664880/2025



I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (065) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : (01) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (664880) KANTOR DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	24.932.100.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	24.932.100.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0
(dalam ribuan rupiah)						

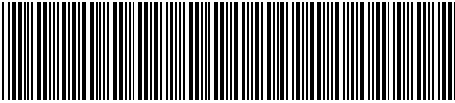
No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DS:0460-0800-6586-2280

Kementerian Negara/Lembaga : (065) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : (01) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (664880) KANTOR DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER	
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
664880	KANTOR DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	24.932.100	-	-	-	24.932.100	01 . 54		
065.01.ED	Program Penanaman Modal dan Hilirisasi	-	24.932.100	-	-	-	24.932.100			
3226	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I	-	4.531.456	-	-	-	4.531.456			
3226.BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	835.870	-	-	-	835.870			
01 RM		-	835.870	-	-	-	835.870			088@
3226.BMA	Data dan Informasi Publik (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	782.578	-	-	-	782.578			01 . 54
01 RM		-	782.578	-	-	-	782.578			088@
3226.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.913.008	-	-	-	2.913.008			01 . 54
01 RM		-	2.913.008	-	-	-	2.913.008			088@
3227	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II	-	4.764.713	-	-	-	4.764.713			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.664880/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



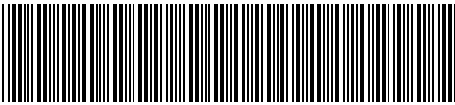
DS:0460-0800-6586-2280

Kementerian Negara/Lembaga : (065) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : (01) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (664880) KANTOR DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
3227.BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.599.990	-	-	-	1.599.990	01 . 54	
01 RM		-	1.599.990	-	-	-	1.599.990	088@	
3227.BMA	Data dan Informasi Publik (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.210.072	-	-	-	1.210.072	01 . 54	
01 RM		-	1.210.072	-	-	-	1.210.072	088@	
3227.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.954.651	-	-	-	1.954.651	01 . 54	
01 RM		-	1.954.651	-	-	-	1.954.651	088@	
3228	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III	-	4.418.929	-	-	-	4.418.929		
3228.BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.879.980	-	-	-	1.879.980	01 . 54	
01 RM		-	1.879.980	-	-	-	1.879.980	088@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.664880/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

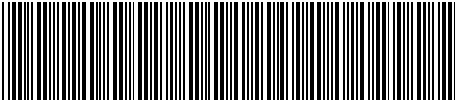


DS:0460-0800-6586-2280

Kementerian Negara/Lembaga : (065) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : (01) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (664880) KANTOR DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
3228.BMA	Data dan Informasi Publik (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.095.955	-	-	-	1.095.955	01 . 54	
01 RM		-	1.095.955	-	-	-	1.095.955	088@	
3228.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.442.994	-	-	-	1.442.994	01 . 54	
01 RM		-	1.442.994	-	-	-	1.442.994	088@	
3229	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	-	6.856.259	-	-	-	6.856.259		
3229.BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.264.990	-	-	-	2.264.990	01 . 54	
01 RM		-	2.264.990	-	-	-	2.264.990	088@	
3229.BMA	Data dan Informasi Publik (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.624.052	-	-	-	2.624.052	01 . 54	
01 RM		-	2.624.052	-	-	-	2.624.052	088@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.664880/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

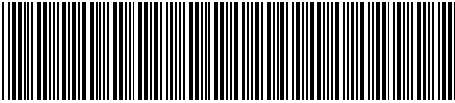


DS:0460-0800-6586-2280

Kementerian Negara/Lembaga : (065) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : (01) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (664880) KANTOR DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3229.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.967.217	-	-	-	1.967.217	01 . 54	
	01 RM	-	1.967.217	-	-	-	1.967.217	088@	
	6781 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah V	-	4.360.743	-	-	-	4.360.743		
6781.BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	917.940	-	-	-	917.940	01 . 54	
	01 RM	-	917.940	-	-	-	917.940	088@	
6781.BMA	Data dan Informasi Publik (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	282.739	-	-	-	282.739	01 . 54	
	01 RM	-	282.739	-	-	-	282.739	088@	
6781.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	206.850	-	-	-	206.850	01 . 54	
	01 RM	-	206.850	-	-	-	206.850	088@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.664880/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0460-0800-6586-2280

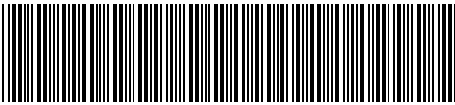
Kementerian Negara/Lembaga : (065) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : (01) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (664880) KANTOR DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6781.QAH 01 6781.QDH 01	Pelayanan Publik Lainnya (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.700.086	-	-	-	2.700.086	01 . 54	
	RM	-	2.700.086	-	-	-	2.700.086	088@	
	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	253.128	-	-	-	253.128	01 . 54	
	RM	-	253.128	-	-	-	253.128	088@	
JUMLAH		-	24.932.100	-	-	-	24.932.100		

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

ttd.
Rosan Perkasa Roeslani
NIP. 3174053112680002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.664880/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:0460-0800-6586-2280

Kementerian Negara/Lembaga : (065) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : (01) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (664880) KANTOR DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

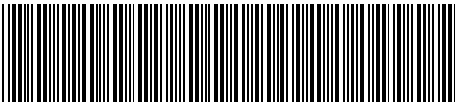
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	664880	KANTOR DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	205.258	1.596.019	212.822	950.647	694.752	415.283	726.732	657.179	0	0	19.473.409	24.932.100
		BELANJA BARANG	0	205.258	1.596.019	212.822	950.647	694.752	415.283	726.732	657.179	0	0	19.473.409	24.932.100
		065.01.ED.3226 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I	0	164.357	161.538	14.474	194.266	97.043	24.870	100.000	0	0	0	3.774.907	4.531.456
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	164.357	161.538	14.474	194.266	97.043	24.870	100.000	0	0	0	3.774.907	4.531.456
		065.01.ED.3227 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II	0	0	217.054	80.483	178.166	182.084	316.628	280.000	280.000	0	0	3.230.299	4.764.713
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	217.054	80.483	178.166	182.084	316.628	280.000	280.000	0	0	3.230.299	4.764.713
		065.01.ED.3228 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III	0	0	72.428	88.725	254.911	134.146	41.647	241.216	270.392	0	0	3.315.463	4.418.929
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	72.428	88.725	254.911	134.146	41.647	241.216	270.392	0	0	3.315.463	4.418.929
		065.01.ED.3229 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	0	16.300	1.009.093	29.140	204.495	204.979	32.138	105.516	106.787	0	0	5.147.811	6.856.259
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	16.300	1.009.093	29.140	204.495	204.979	32.138	105.516	106.787	0	0	5.147.811	6.856.259
		065.01.ED.6781 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah V	0	24.600	135.905	0	118.809	76.500	0	0	0	0	0	4.004.929	4.360.743
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	24.600	135.905	0	118.809	76.500	0	0	0	0	0	4.004.929	4.360.743

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

ttd.
Rosan Perkasa Roeslani
NIP. 3174053112680002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.664880/2025
IV A. B L O K I R



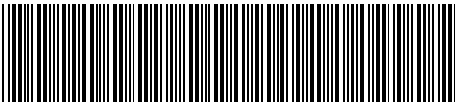
DS:0460-0800-6586-2280

Kementerian Negara/Lembaga : [065] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : [01] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [664880] KANTOR DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
664880	KANTOR DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.972
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 19.473.410		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 19.473.410	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
065.01.ED	Program Penanaman Modal dan Hilirisasi	522141	Belanja Sewa(RM)
3226	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 38.305
3226.BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.144	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27.124
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.306	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 300.346
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 610.039	3226.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521211	Belanja Bahan(RM)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 97.200
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 157.308	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 766
3226.BMA	Data dan Informasi Publik		Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025
	521211 Belanja Bahan(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 77.075	522151	Belanja Jasa Profesi(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 162.600
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		522191	Belanja Jasa Lainnya(RM)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.664880/2025
IV A. B L O K I R

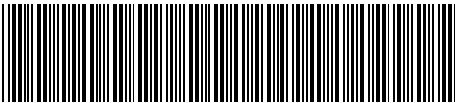


DS:0460-0800-6586-2280

Kementerian Negara/Lembaga : [065] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : [01] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [664880] KANTOR DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
3227	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 557.491	3227.BMA	Data dan Informasi Publik
	Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025		521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 48.000
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 468.210		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211 Belanja Bahan(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 248.251
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.248.021		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.750
	3227 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	3227.BDH Fasilitas dan Pembinaan Badan Usaha		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)		521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)
3227	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.868	3227	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.555
	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		522141 Belanja Sewa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 806.928		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 194.000
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 48.882		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 41.200
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 669.272		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 247.656
	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.664880/2025
IV A. B L O K I R

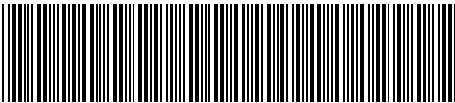


DS:0460-0800-6586-2280

Kementerian Negara/Lembaga : [065] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : [01] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [664880] KANTOR DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
3227.QDH	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.500 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	3228.BMA	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 183.105 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.354.827 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 292.530 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.351 Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Data dan Informasi Publik
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 702.981 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.200 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	3228 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III		521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 93.220 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	3228.BDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.063 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.150 Instruksi Presiden No.1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522141 Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 42.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 154.200 Instruksi Presiden No.1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 33.200
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.874		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.664880/2025
IV A. B L O K I R



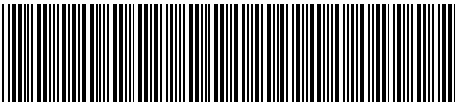
DS:0460-0800-6586-2280

Kementerian Negara/Lembaga : [065] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : [01] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [664880] KANTOR DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Halaman : IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
3228.QDH	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	3229.BDH	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 320.483		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 149.035
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Instruksi Presiden No.1Tahun2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.200		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 439
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 398.797		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.130.182
	Instruksi Presiden No.1Tahun2025		Instruksi Presiden No.1Tahun2025
	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	3229.BMA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)		Data dan Informasi Publik
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.760		521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja(RM)
	Instruksi Presiden No.1Tahun2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 125.337
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 111.422		521211 Belanja Bahan(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.950
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 105.363		521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.200
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 210.140		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.664880/2025
IV A. B L O K I R

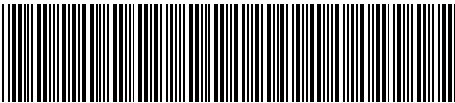


DS:0460-0800-6586-2280

Kementerian Negara/Lembaga : [065] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : [01] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [664880] KANTOR DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
3229.QDH	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27.721 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6781 6781.BDH 6781.BMA	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 39.697 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522141 Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 591.500 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 659.546 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 88.473 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 748.813 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 122.226 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		6781.Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah V
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 573.627 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.756 Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 825.973 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Data dan Informasi Publik
			521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.600 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
			521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 82.805 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.664880/2025
IV A. B L O K I R

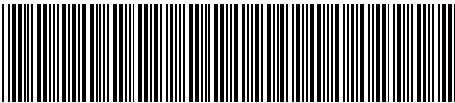


DS:0460-0800-6586-2280

Kementerian Negara/Lembaga : [065] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : [01] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [664880] KANTOR DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6781.FAE	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6781.QDH	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.500		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 270.000
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)		521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.386		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.706
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.400		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 205.800
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025
6781.QAH	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6781.QDH	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.736		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 858.750
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 29.064		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.253.230
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 464
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025
6781.QAH	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6781.QDH	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 81.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.000
6781.QAH	Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025	6781.QDH	Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.664880/2025
IV A. B L O K I R



DS:0460-0800-6586-2280

Kementerian Negara/Lembaga : [065] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : [01] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [664880] KANTOR DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

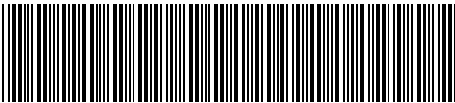
Halaman : IV.A. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 58.564		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 61.195		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

ttd.
Rosan Perkasa Roeslani
NIP. 3174053112680002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.664880/2025
IV B. C A T A T A N



DS:0460-0800-6586-2280

Kementerian Negara/Lembaga : [065] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : [01] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [664880] KANTOR DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

ttd.
Rosan Perkasa Roeslani
NIP. 3174053112680002